

**PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PROGRAM KAMPANYE
PERLINDUNGAN DIRI TERHADAP KRIMINALITAS
OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**



KARYA DISAIN

Oleh :

A N D R I

**TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DISAIN KOMUNIKASI VISUAL
JURUSAN DISAIN FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
1997**

**PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PROGRAM KAMPANYE
PERLINDUNGAN DIRI TERHADAP KRIMINALITAS
OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**



KARYA DISAIN

Oleh :

A N D R I



**TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DISAIN KOMUNIKASI VISUAL
JURUSAN DISAIN FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
1997**

**PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PROGRAM KAMPANYE
PERLINDUNGAN DIRI TERHADAP KRIMINALITAS
OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**



Oleh :

A N D R I

No. Mhs : 911 0512 023

**Tugas Akhir ini diajukan kepada Tim Penguji
Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta
sebagai salah satu syarat mengakhiri
Jenjang Studi Sarjana S-1 dalam bidang
Disain Komunikasi Visual**

1997

Tugas Akhir ini diterima
oleh Tim Penguji, Jurusan Disain
Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia
Yogyakarta _____



Drs. Sadjiman

Pembimbing I / Anggota



Dra. Th. Suwarni

Pembimbing II / Anggota



Dr. Sumartono, MA

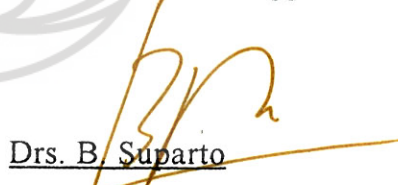
Cognate / Anggota



Drs. M. Umar Hadi, MS

Ketua Program Studi

DISKOMVIS / Anggota



Drs. B. Suparto

Ketua Jurusan Disain

Ketua / Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Seni Rupa



Drs. Sun Ardi, S.U.

NIP. 130 321 410

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya, karya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, bapak Drs. Sun Ardi, SU
2. Pembantu Dekan I, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, bapak Drs. Subroto SM
3. Ketua Jurusan Disain, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, bapak Drs. B. Suparto
4. Ketua Program Studi Disain Komunikasi Visual, bapak Drs. M. Umar Hadi, MS
5. Dosen Pembimbing I, bapak Drs. Sadjiman
6. Dosen Pembimbing II, ibu Dra. Th. Suwarni
7. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, perwakilan Yogyakarta.
8. Humas Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yogyakarta, bapak Budi Hartono, SH
9. Bapak, Ibu dan adikku
10. Keluarga besar Lowanu 3, Keluarga besar '91, Diskom '91 Keluarga besar Horreg, Rif'an Comp. dan Godot Comp.
11. Rekan - rekan TA 96/97

12. Seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya Tugas Akhir ini

13. Tiwi

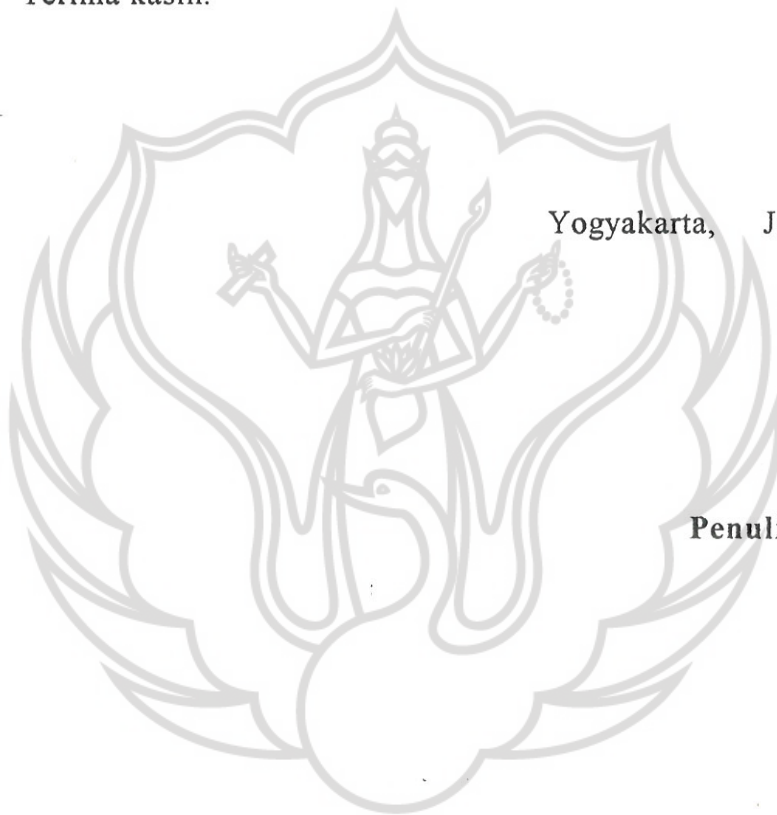
Semoga karya Tugas Akhir yang masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi siapa saja.

Saran dan kritik selalu saya terima dengan tangan terbuka.

Terima kasih.

Yogyakarta, Januari 1997

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Dalam.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Perancangan.....	5
D. Metode Perencanaan.....	6
E. Sistematika Isi Laporan.....	7
BAB II INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA	
A. Pengumpulan Data.....	9
1. Khalayak (Pengguna Jasa LBH).....	9
2. Masalah-masalah khalayak.....	10
3. Sasaran.....	11
4. Hambatan-hambatan.....	11
5. Usaha-usaha yang perlu dilakukan.....	12
B. Pengolahan Data.....	13
C. Penetapan-penetapan.....	14

1. Tujuan Kampanye.....	14
2. Tujuan Komunikasi.....	15

BAB III KONSEP PERANCANGAN

A. Perencanaan Media.....	16
1. Tujuan Media.....	17
2. Strategi Media.....	19
3. Program Media.....	23
4. Biaya Media.....	24
B. Perencanaan Kreatif.....	26
1. Tujuan Kreatif.....	26
2. Strategi Kreatif.....	27
3. Program Kreatif.....	33
4. Biaya Kreatif.....	50
STUDY LAYOUT.....	53

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	67
Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Kriminalitas atau tindak kejahatan dewasa ini semakin dirasa meresahkan masyarakat, baik di negara - negara maju maupun negara - negara berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat di Indonesia turut merasakan pula hal tersebut tidak hanya di kota - kota besar saja, tetapi hampir dapat dipastikan di seluruh tempat dimana manusia tinggal dan bersosialisasi dalam suatu sistem dan situasi kondisi tertentu. Masalah tersebut semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali. Sementara itu kecenderungan masalah nasional ini meningkat pesat dari waktu ke waktu, secara kualitas maupun kuantitasnya.

Di sela -sela kondisi destruktif yang serba rumit itu, para ilmuwan, rohaniawan, pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintah, telah berusaha secara maksimal untuk melakukan langkah - langkah yang nyata guna mencegah dan menanggulangi masalah tersebut. Walaupun usaha maksimal tersebut telah dilakukan secara intensif dan terarah oleh pemerintah bersama dengan masyarakat, namun sampai saat ini tingkat keberhasilannya masih dalam tahap analisis saja.¹

¹ Sudarsono, SH, Drs., *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 4-6

Sementara itu, masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam suatu lingkaran sosial budaya lebih membutuhkan hasil nyata yang lebih baik.

Keberadaan pendidikan formal, informal dan non-formal yang ditangani secara sungguh - sungguh dan terencana, terbukti dapat memberikan sumbangan positif dan konstruktif dalam upaya penanganan masalah tersebut. Pendidikan dalam pengertian integral dan totalistik dapat menjadi pemandu utama dalam usaha tersebut, disamping aspek - aspek lain yang relevan.²

Tetapi apakah artinya bila pada prakteknya masyarakat sebagai pelaku dan obyek dari suatu lingkaran sosial budaya hanya selalu berpikir untuk melakukan tindakan 'pengobatan' saja dari adanya suatu gejala tindak kejahatan di lingkungannya tanpa dibarengi dengan aksi preventif dari ancaman bahaya tindak kejahatan yang akan terjadi. Pada kenyataannya, individu - individu dan/atau sekelompok orang masih banyak tergantung pada perangkat yang dianggapnya sebagai penanggungjawab utama, atau yang bersinggungan langsung dengan segala permasalahan tentang kriminalitas itu saja, seperti pihak Kepolisian atau Kejaksaan.

Suatu lingkaran sistem dalam kehidupan kemasyarakatan kita sering terlambat menyadari dan 'mengobati' situasi keamanan di lingkungannya yang terlanjur memburuk dan telah berakar dengan sangat kuat.

Memang seperti kita ketahui bersama, bahwa masalah kriminalitas selalu ada dan hadir menyertai suatu matarantai sosial budaya dan kemasyarakatan dari waktu ke waktu.

² *Ibid.* Hal: 82 - 83

Atau bahkan mungkin telah menjadi suatu bagian tersendiri dari matarantai suatu sistem kemasyarakatan itu sendiri.

Seorang kriminolog, yang juga salah seorang pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Soedjono Dirjosisworo, SH, mengemukakan asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak digunakan di negara - negara maju . Ada dua sistem, yaitu :

1. *Cara Moralistic*, dilaksanakan dengan menyebarluaskan ajaran agama dan moral, perundang - undangan yang baik dan sarana lain yang diharapkan dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. *Cara Abolitionistis*, yaitu dengan berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan beserta sebab musababnya, seperti : tekanan ekonomi, kondisi politik dan lain sebagainya.³

Dalam kaitan ini, Bonger menegaskan bahwa : “mencegah kejahatan beserta penyebabnya adalah lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”.⁴

Tetapi di sisi lain, masyarakat sering terlupa akan keberadaan diri dan lingkungannya, yang sangat strategis dalam menghadapi persoalan semacam ini. Masyarakat sebagai pelaku sekaligus obyek sosial kemasyarakatan itu sendiri, seharusnya juga berfungsi sebagai alat kontrol dan ‘penjaga’ sistem keamanan dan perlindungan diri masyarakat, dalam menghadapi ancaman bahaya kejahatan di lingkungannya. Paling tidak bagi individu - individu atau segolongan orang yang rawan terhadap ancaman tindak kejahatan itu.

³ Soedjono, D.SH, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983

⁴ Bonger, W.A, dan Kempe, G,Dr, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pembangunan - Pustaka Sarjana, Jakarta, 1970

✓ Jadi, pada prinsipnya masih sangat diperlukan sekali adanya suatu program kampanye atau layanan pemberitahuan yang efektif dan terencana bagi masyarakat, tentang perlunya penyadaran perlindungan diri terhadap ancaman tindak kejahatan. Masyarakat harus dapat memastikan apakah keadaan diri dan lingkungannya rawan dan terancam bahaya kejahatan atau tidak. Atau justru sebaliknya, apakah keadaan dirinya dalam suatu lingkungan tertentu justru akan menjadi 'ancaman' atau 'potensi' dari munculnya gejala tindak kejahatan itu sendiri, secara personal maupun kelompok.

Dengan demikian, kejelasan tentang hal tersebut di atas perlu kita berikan kepada khalayak ramai melalui suatu bentuk **Iklan Layanan Masyarakat** (selanjutnya kita sebut **ILM**).

Menurut Kasali, ada banyak hal atau masalah yang dapat diiklankan melalui suatu ILM, meliputi :

1. Kebakaran hutan dan penebangan secara liar.
2. Kesadaran yang masih rendah di kalangan produsen untuk memasang peralatan untuk mencegah bahaya polusi.
3. **Kriminalitas.**
4. Mutu lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi serta minat untuk menjadi tenaga pengajar.
5. Penyalahgunaan narkoba.
6. Korupsi.
7. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
8. Pentingnya bahasa Inggris dalam pergaulan Internasional.
9. Produk - produk yang tidak bermutu dan membahayakan umum.
10. Perkelahian antarpelajar, dan sebagainya.⁵

⁵ Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992, Hal. 205 - 206

Untuk itulah, melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia—suatu lembaga swadaya sosial kemasyarakatan yang terkait dan sangat peduli terhadap masalah tersebut di atas—maka disusunlah suatu: **Konsep Perancangan Komunikasi Visual Iklan Layanan Masyarakat Program Kampanye Perlindungan Diri Terhadap Kriminalitas oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat bahwa ternyata masih sangat kurangnya suatu bentuk program kampanye tentang penyadaran perlindungan diri masyarakat terhadap ancaman bahaya kejahatan, maka :

1. Bagaimana menyusun suatu konsep perencanaan dan perancangan yang khas dan efektif tentang ‘gerakan’ penyadaran masyarakat terhadap segala ancaman tindak kejahatan itu.
2. Bagaimana merencanakan dan merancang suatu program kampanye itu ke dalam bentuk rancangan visual yang efektif dan komunikatif serta memiliki ciri khas yang unik dan menarik.

C. Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan komunikasi visual program kampanye ini adalah :

1. Untuk mendapatkan konsep yang tepat bagi program kampanye perlindungan diri terhadap kriminalitas yang terencana dan diharapkan dapat terus berkesinambungan.

2. Untuk mendapatkan bentuk rancangan visual atau disain yang tepat, komunikatif, berkarakter dan unik bagi program kampanye tersebut.
3. Untuk dapat turut lebih memantapkan citra (*corporate image*) lembaga terkait yang berhubungan langsung dan menjadi pendukung program kampanye ini.

Secara keseluruhan, perencanaan dan perancangan komunikasi visual dari rangkaian kegiatan ini tetap mengacu dan bertumpu pada program kampanye sejenis yang telah ada, dan dilakukan oleh lembaga penyelenggaranya, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

D. Metode Perencanaan

1. Persiapan

Meliputi pengumpulan data dan pengolahan data dari lembaga atau instansi terkait yang berwenang dalam masalah tersebut, dalam hal ini dengan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Perencanaan

Membuat suatu perencanaan komunikasi visual yang meliputi perencanaan media dan perencanaan kreatif secara terpadu dan selaras dengan data yang telah tersedia.

Perencanaan media digunakan untuk menentukan pemilihan media yang tepat, pengalokasian biaya media dan penjadwalan program media. Sementara perencanaan kreatif meliputi pesan verbal dan bentuk pesan visual (yang diformulasikan ke dalam bentuk komunikasi visual). Bentuk pesan haruslah selalu

mencakup kedua hal tersebut (verbal dan visual), berdasarkan konsep pokok program kampanye yang telah ada dan telah berjalan, dari lembaga terkait.

3. Perancangan

Pendekatan kreatif atau perancangan kreatif dibuat dengan selalu berpatokan pada penentuan :

- ilustrasi
- headline (judul/tema)
- body copy
- slogan/maskot kampanye
- logo kampanye

dan harus selalu disesuaikan dengan format media terpilih yang direncanakan akan dipakai.

E. Sistematika Isi Laporan

1. Bagian pertama adalah Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Perancangan, Metode Perancangan dan Sistematika Isi Laporan.
2. Bagian kedua berisi Inventarisasi dan Identifikasi Data, yang meliputi Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penetapan - penetapan.
3. Bagian ketiga adalah Konsep Perancangan, yang meliputi Perencanaan Media dan Perencanaan Kreatif serta Lay-out/alternatif Disain.
4. Bagian Keempat adalah Penutup dan Daftar Pustaka.

SKEMA PERANCANGAN

